

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali. 2001. Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya). Penerbit Ghalia. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1991. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Cetakan pertama. Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Chairul Huda. 2013. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987. Tindak Pidana Pemilu. Jakarta. Sinar Harapan.
- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana. Jakarta.
- Gunawan Suswantoro. 2015. Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Harahap Abdul Asri. 2005. Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Hans Kelsen. 2006. Teori Hukum tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan judul asli, General Theory of Law and State. Penerbit Nusamedia dan penerbit Nuansa. Bandung.
- Heru Widodo. 2015. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak. Sinar Grafika. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Cetakan ke 3. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Kunarto. 1999. Analisis Data Personil Dan Dimensi Permasalahannya Dalam Rangka Menunjang Operasional Polri, Jakarta:, 1999

- Lamintang. 1997. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bakti Cipta Manunggal. Bandung.
- Lawrence Friedman. 1984. American Law, An Ifitroduction. W.W. Norton & Company. New York.
- Marzuki. 2016. Penelitian Hukum, cetakan 12. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Muhammad Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Mahi M, Hikmat. 2010. Komunikasi Politik, Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ni"Matul Huda, 2010, Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta.
- Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo. Jakarta.
- R. Subekti. 2005. Pokok-Pokok Hukum Peerdata. PT. Intermedia. Cetakan XXXII. Jakarta.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana 1. Yayasan sudarto. Semarang.
- Sacipto Rahardjo. 1986. Hukum dan Perubahan Sosial. Penerbit Alumni. Bandung.
- Paimin Napitupulu, 2004. Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta. Penerbit Alumni. Bandung.
- Topo Santoso. Tindak Pidana Pemilu. Sinar Grafika. Cetakan Pertama. Jakarta.
- Valerine. J.L.K. 2009. Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Website

www.bawaslu.go.id/pdf

<http://seputarpengertian.Edulaw.com>

//observerindonesia.co/obsi/blog/2015/07/31/ini-daftar-daerah-yang-melangsungkanpilkada-serentak-2015.

://www.bawaslu.go.id/id/press-release/sentra-gakkumdu-optimalisasi-penangananpidana-pemilu

Artikel dan Jurnal

Dedi Mulyadi, Perbandingan tindak pidana pemilu legislatif dalam perspektif hukum di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, 2013.

Henk Schulte Nordholt, (ed.) & Ireen Hoogenboom (ast.ed.), Indonesian in Transition., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006:

Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol 2 Nomor 2, November 201

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 7 TAHUN 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.